

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota merupakan suatu proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda dicirikan dengan penduduk yang semakin bertambah sehingga terjadi peningkatan terhadap kepadatan penduduk, bangunan-bangunan yang semakin bertambah banyak dan rapat, semakin luasnya wilayah yang terbangun, serta fasilitas yang semakin lengkap pada suatu kota guna memenuhi kegiatan dalam kehidupan manusia baik sosial dan ekonomi (Branch,1996). Kondisi kota-kota di Indonesia yang semakin berkembang menjadikan kota sebagai pusat-pusat kegiatan menjadi penarik bagi penduduk daerah sekitarnya untuk mencari lapangan pekerjaan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Peluang kota yang dipandang menjanjikan tersebut menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke perkotaan dari tahun ke tahun dimana mereka berasal dari keadaan ekonomi yang berbeda.

Meningkatnya tingkat migrasi ke perkotaan menyebabkan pertumbuhan penduduk berlangsung dengan cepat. Sementara disisi lain kota belum mampu merealisasikan rencana sistem perkotaan dalam menunjang kegiatan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang direncanakan. Dengan keadaan tersebut akan menyebabkan masalah karena dengan peningkatan migrasi tersebut maka kota menampung lebih banyak penduduk, mengatur serta mendayagukannya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari banyaknya pertambahan penduduk yang pindah ke kota adalah sedikitnya lahan terbuka

untuk pemenuhan kebutuhan pemukiman atau tempat tinggal bagi pendatang. Peningkatan permintaan penggunaan lahan akan menyebabkan harga tanah atau perumahan menjadi semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Bagi masyarakat yang bekerja disektor formal memungkinkan untuk mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni dengan mudah, namun bagi masyarakat yang bermatapencarian pada sektor nonformal mereka harus mencari cara supaya dapat memiliki tempat tinggal walaupun di tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk tempat berhuni. Sebagian besar dari mereka dapat mendirikan rumah di daerah legal atau daerah yang memang direncanakan sebagai tempat tinggal yaitu di daerah pusat kota, namun dengan kondisi tersebut menyebabkan beban pada pusat kota bertambah. Disisi lain, sebagian pendatang akan menciptakan tempat tinggal didaerah yang dilarang untuk mendirikan bangunan hunian seperti jalan rel kereta api ataupun bantaran sungai. Sehingga dengan keadaan tersebut akan menyebabkan jaring-jaring kegiatan yang bertolakbelakang dengan kegiatan kota, termasuk dengan munculnya permukiman yang tumbuh di luar rencana tata ruang kota dan menyebabkan terbentuknya permukiman-permukiman yang kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu masalah yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang, permasalahan ini cukup serius karena luasnya yang terus meningkat. Masalah ini hampir dihadapi oleh kota-kota besar terutama kota-kota besar yang ada dinegara berkembang termasuk Indonesia, sebab Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai peningkatan penduduk yang cepat. Saat ini kawasan permukiman kumuh di

Indonesia semakin meluas menjadi dua kali lipat selama lima tahun terakhir ini. Direktur Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, menyebutkan REI mencatat bahwa luas kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2014 adalah 38.000Ha, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 87.000Ha.

Keadaan ini menjadi tantangan yang semakin kompleks oleh penambahan penduduk tersebut. Apabila pertumbuhan dari permukiman kumuh terus dibiarkan, maka akan terus menjadi masalah yang lebih serius lagi bagi Indonesia untuk dihadapi kedepannya. Namun walaupun begitu berbagai program dan upaya berusaha terus dilakukan untuk mengurangi dan mengatasinya, tetapi tetap saja terus dijumpai permukiman masyarakat yang tidak teratur dan ilegal pada sudut kota.

Keberadaan permukiman kumuh atau disebut sebagai *slum area* memiliki kemungkinan besar menimbulkan masalah terhadap perkotaan sehingga perlu dilakukan penanganan untuk mengatasinya. Penanganan terhadap masalah permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu, tidak dapat dilakukan hanya sepihak melainkan harus bersama-sama dalam menyinergikan sasaran capaian penanganan permukiman kumuh yang harus dilakukan. Dengan demikian konsep penanganan permukiman kumuh harus jelas dan sesuai dengan kondisi permasalahan wilayahnya.

Kota Medan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara yang berkembang menjadi pusat perekonomian daerah di Sumatera. Pembangunan sedang digencarkan untuk mendukung pertumbuhan kota, namun seiring dengan majunya pembangunan di Kota Medan berimplikasi pada kualitas hidup

penduduknya. Kota Medan teridentifikasi memiliki masalah dalam penataan permukiman penduduk yaitu banyaknya kawasan kumuh yang berada di Kota Medan. Salah satu penyebab permukiman kumuh di Kota Medan adalah kepadatan penduduk serta terdapat penduduk miskin yang terpusat di beberapa kecamatan.

Menurut Surat Keputusan Walikota Medan NO.640/580.K/XI/2018 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan, menyebutkan bahwa luas kawasan permukiman kumuh di Kota Medan mencapai 200,29 Ha yang terdiri dari 19,684 KK yang tersebar di 42 Kelurahan dan 18 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Medan Petisah.

Berdasarkan hasil verifikasi daftar kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kota Medan dengan ditetapkannya berdasarkan Kelurahan Petisah Tengah menjadi salah satu titik permukiman kumuh yang berada di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Luas wilayah kumuh Kelurahan Petisah Tengah adalah 127 Ha dengan jumlah penduduk 3.228 dan 1.183 KK. Sebaran permukiman kumuh di kelurahan Petisah Tengah berdasarkan hasil verifikasi Keputusan walikota Medan tersebar pada lingkungan 1, 3, 5 dan 7 dari 16 lingkungan di Kelurahan Petisah Tengah. Permukiman ini berada di pinggiran Sungai Babura, lokasi ini digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan yang dijadikan sebagai tempat bermukim sejak puluhan tahun lalu dan semakin bertambah setiap tahunnya. Dari kenampakan fisiknya lingkungan pemukiman ini memiliki jarak rumah yang rapat dan padat sehingga banyak yang atapnya berdempetan satu sama lain, gang yang sempit, dan juga sampah yang masih berserakan di

pinggiran sungai akibat buangan dari rumah masyarakat setempat. Keadaan tersebut memberikan kesan kumuh terlihat dari deretan rumah-rumah yang tidak teratur dan kondisi lingkungannya.

Permukiman kumuh yang terdapat di pinggiran Sungai Babura, Kelurahan Petisah Tengah sudah lama terbentuk namun belum dapat teratasi karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal yang menyebabkan permasalahan permukiman di Kelurahan Petisah Tengah adalah permasalahan sarana dan prasarana atau kondisi fisik pada lingkungan seperti rumah yang tidak memiliki keteraturan dan tidak layak huni, jalan yang kurang memadai, pengelolaan sampah yang kurang sesuai standar, serta drainase lingkungan juga kurang memadai. Kondisi inilah yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman yang menimbulkan kesan kotor dan tidak terawat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang diidentifikasi adalah 1) Meningkatnya kepadatan penduduk dan kualitas permukiman yang kurang baik di Pinggiran Sungai Babura, Kelurahan Petisah Tengah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah. 2) Penentuan tingkat kekumuhan menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Medan Petisah berdasarkan aspek dan kriteria tingkat kekumuhan. 3) Masalah permukiman kumuh masih belum teratasi sehingga perlu mendapatkan arahan yang sesuai dengan permasalahan pada wilayah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak terlalu luas cakupannya maka dilakukan pembatasan masalah yaitu: 1) Menganalisis tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah berdasarkan 7 aspek tingkat kekumuhan dengan kriteria kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kondisi drainase dan proteksi kebakaran, 2) mengidentifikasi masing-masing aspek dan kriteria tingkat kekumuhan yang menjadi prioritas penyebab kekumuhan di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 3) strategi penanganan yang sesuai untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah?
2. Faktor apa yang menyebabkan kekumuhan berdasarkan tingkat prioritas aspek kekumuhan di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah?
3. Bagaimana strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
2. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kekumuhan berdasarkan tingkat prioritas aspek kekumuhan di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
3. Menjelaskan strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan PetisahTengah, Kecamatan Medan Petisah?

F. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah beserta strategi penanganannya.
 - b. Sebagai bahan referensi ilmiah dan sumber informasi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kecamatan Medan Petisah dalam mengambil kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.